

DAMPAK ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus LAZDAI dan DPU-DT di Bandar Lampung)

AMIN NUR KHOLID

aminnurkholid@gmail.com

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah Mohammad Natsir

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisa dampak pendistribusian ZIS dalam mereduksi tingkat kemiskinan dan mempercepat proses pengentasan kemiskinan dengan mengambil studi kasus Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) dan DPU-DT Lampung. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan Data yang digunakan adalah data tahun 2011. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada 186 reponden (mustahik). Sedangkan data sekunder berupa garis kemiskinan berdasarkan nishab emas dan literature pendukung. Penelitian ini menggunakan sejumlah alat analisa, yaitu *T-Statistik* untuk mengetahui apakah distribusi ZIS berpengaruh nyata terhadap pendapatan mustahik atau tidak, *Headcount Ratio* (H) untuk mengetahui insiden kemiskinan (*poverty incidence*), *Poverty Gap Ratio* (P1) dan *Income Index* (I) untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan, dan *Sen Index of Poverty* (P2) serta *FGT Index* (P3) untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Sedangkan formula *Time Taken to Exit* digunakan untuk menganalisa waktu yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan rumah tangga mustahik. **Hasil penelitian:** Pada taraf nyata 5 persen, distribusi ZIS berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan keluarga mustahik. Distribusi ZIS mampu mereduksi jumlah kemiskinan (*poverty incidence*), kedalaman kemiskinan (*poverty gap* dan *income index*), dan keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ZIS mampu mempersingkat/mempercepat waktu pengentasan kemiskinan.

Keyword. Zakat, infaq, sedekah, kemiskinan,

PENDAHULUAN

Di antara persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini adalah persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Terlepas dari komitmen pemerintah yang semakin tinggi dalam pengentasan kemiskinan, angka kemiskinan masih berada di level yang tinggi dan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin meningkat.

Pasca krisis 1997, strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran berbasis pertumbuhan ekonomi, tidak efektif.¹ Tingkat pertumbuhan yang meyakinkan dan semakin

¹IZDR 2010, Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional, Ciputat: IMZ, Cet. II 2011, hal. 3.

tinggi, terbukti belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga belum mampu memperbaiki distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Tabel 1.1 berikut menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, prosentase penduduk miskin, dan rasio gini periode 2005-2011.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin, Prosentase Penduduk Miskin, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Rasio 2005-2011.

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	% Terhadap Total Populasi	Gini Rasio
1	2005	5,6	35,10	15,97	0,34
2	2006	6,1	39,30	17,75	0,36
3	2007	6,3	37,17	16,58	0,38
4	2008	6,1	34,96	15,42	0,37
5	2009	4,5	32,53	14,15	0,37
6	2010	6,1	31,02	13,33	0,38
7	2011	6,5	30,02	12,49	0,43

Sumber: BPS. ²

Secara umum, sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 1.1, angka kemiskinan dalam kurun waktu 2005- Maret 2011 turun sebesar 5,08 juta jiwa, yaitu 35,10 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 30,02 juta jiwa pada Maret 2011. Sementara prosentase penduduk miskin terhadap total populasi turun sebesar 3,48 persen, yaitu dari 15,97 persen menjadi 12,49 persen pada periode yang sama. Hal ini menegaskan rendahnya prosentase penurunan tingkat kemiskinan selama 6 tahun.

Meskipun trennya terjadi penurunan, tapi jumlah penduduk miskin yang mencapai lebih 30 juta jiwa ini masih tergolong cukup besar mengingat sumber daya alam kita yang melimpah. Selain itu, angka tersebut hanya menghitung warga yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan Rp 233.740,- per kapita perbulan (GK Maret 2011), bukan warga miskin yang pengeluarannya hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Menurut Khudori,³ jika golongan terakhir ini dihitung, jumlahnya bisa mencapai 70 juta (seperti penerima raskin) atau 76,4 juta (penerima jamkesmas).

Sementara itu, berdasarkan rasio gini, ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat ternyata mengalami peningkatan dari 0,34 pada 2005 menjadi 0,43 pada Maret 2011. Kondisi ini mengindikasikan kue pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok menengah ke atas, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kue pertumbuhan ekonomi yang

² Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011, Jakarta: BPS 2011, hal. 44-54 (Soft Copy), dan Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2011, BPS.

³Khudori, *Gagal Atasi Kemiskinan*, Republika, Kamis, 13 Januari 2011, hal. 2 .

dinikmati oleh kelompok menengah ke bawah. Meskipun ketimpangan pendapatan pada 2011 masuk kategori *sedang* versi bank dunia, namun hal ini patut menjadi perhatian serius karena apabila rasio gini mencapai angka 0,5 maka ketimpangan pendapatan sudah masuk katagori buruk (tinggi). Kesenjangan ekonomi yang tinggi akan memicu masalah sosial jika tidak segera diatasi.

Hal yang sama juga terlihat dengan kriteria pengukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia⁴ membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40% penduduk berpendapatan terendah, 40% berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tertinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, pada tabel 1.2 ditunjukkan bahwa *share* pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah terus mengalami penurunan, dari 21,84% pada tahun 2005 menjadi 16,86% pada tahun 2011. Sementara itu, *share* pertumbuhan ekonomi yang dinikmati 20% penduduk berpenghasilan tertinggi mengalami peningkatan, dari 40,43% pada tahun 2005 menjadi 48,41% pada tahun 2011.

Tabel 1.2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan 2005 – 2011 (Kriteria Bank Dunia)

N o	Tahun	40% berpendapatan terendah	40% berpendapatan menengah	20% berpendapatan tertinggi
1	2005	21,84	37,73	40,43
2	2006	21,42	37,65	41,26
3	2007	18,74	36,51	44,75
4	2008	18,72	36,43	44,86
5	2009	18,96	36,14	44,90
6	2010	19,88	37,97	42,15
7	2011	16,86	34,73	48,41

Sumber: BPS.⁵

Memang tidak mudah mengentaskan kemiskinan. Apalagi kemiskinan merupakan bagian dari mata rantai lingkaran yang saling mempengaruhi. Inilah yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan atau perangkap kemiskinan (*vicious cirle of poverty*). Menurut Jhingan,⁶ lingkaran setan kemiskinan yang dikenalkan oleh Nurkse ini mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan seseorang atau masyarakat suatu negara tetap berada dalam keadaan melarat. Lingkaran setan kemiskinan pada pokoknya berasal dari rendahnya produktivitas sebagai akibat kurangnya ketersediaan modal.

⁴ Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011, Jakarta: BPS 2011, hal. 58-60 (Soft Copy).

⁵ Ibid, hal.59.

⁶ Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 1996, hal.42-43.

Secara umum, teori lingkaran setan kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷ produktivitas yang rendah akan menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan tabungan yang rendah, sehingga investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah menyebabkan kurangnya modal. Kurangnya modal kembali menyebabkan rendahnya produktivitas. Bagaimana mungkin masyarakat akan memiliki tingkat pendapatan tinggi jika produktivitasnya rendah. Lingkaran ini dilukiskan pada gambar 1.1

Gambar 1.1. Lingkaran Setan Kemiskinan



Sumber: Jhingan.⁸

Rendahnya prosentase penurunan kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan menegaskan perlunya revitalisasi strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif. Untuk itu, pemanfaatan instrumen yang memiliki potensi besar dalam mereduksi angka kemiskinan sangat dibutuhkan. Diantaranya adalah melalui zakat, infak dan sedekah (ZIS), yang merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Islam setelah sektor riil (bisnis, perdagangan) dan sektor keuangan (moneter).

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang tepat dan efektif. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam. Potensi zakat berdasarkan riset Baznas dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun 2011⁹ mencapai angka 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau tidak kurang dari Rp 217 triliun setiap tahunnya. Potensi zakat yang sangat besar ini, menurut Beik dan Tsani (2012),¹⁰ harus dapat dioptimalkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Apalagi secara peruntukannya, al-Quran memprioritaskan penyaluran zakat pada 8 kelompok, di mana fakir miskin menjadi kelompok yang mendapat prioritas utama. Jadi

⁷ Ibid, hal.43

⁸Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, hal. 43.

⁹<http://www.baznas.or.id/ib-peduli/> (diakses pd 17-09-2012, pk1.09.27.WIB).

¹⁰Beik, Irfan Syauqi dan Tsani, Tiara dalam "Menurunkan Kemiskinan Melalui Pendayagunaan Zakat." Jurnal Iqtishodia, Republika, Kamis, 23 Februari 2012, hal.23.

dengan demikian, keberadaan zakat dan ditambah dengan infak serta sedekah akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan diharapkan dapat terakselerasi dengan baik.

Oleh karena itu, pengembangan zakat, infak dan sedekah (ZIS) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Integrasi ZIS dalam kebijakan pembangunan nasional diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.¹¹

Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi adalah Propinsi Lampung yang basis utama perekonomiannya adalah pertanian. Berdasarkan data BPS per Maret 2011,¹² Propinsi Lampung merupakan propinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke lima di Indonesia dan ke dua di pulau Sumatera yaitu sebesar 1,30 juta jiwa atau 16,93 persen dari total populasi. Salah satu wilayah di Propinsi Lampung yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi adalah kota Bandar Lampung. Berdasarkan data BPS,¹³ jumlah penduduk miskin di wilayah ini berada di urutan ke lima di Propinsi Lampung pada tahun 2010, yaitu sebesar 128.600 jiwa atau 14,58 persen dari total populasi.

Upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Bandar Lampung telah dilakukan oleh pemerintah kota dan masyarakat setempat. Diantara upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah pendayagunaan dana ZIS melalui Lembaga Amil Zakat. Di Bandar Lampung terdapat dua lembaga amil zakat yaitu Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI) dan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT). Pendayagunaan ZIS oleh dua LAZ tersebut diduga memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Penelitian-penelitian tentang dampak empiris ZIS terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan perlu dilakukan. Hal ini untuk meyakinkan pengambil keputusan (pemerintah) tentang pentingnya ZIS dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga mau mengintegrasikan ZIS ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran ZIS terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dengan mengambil studi kasus LAZDAI dan DPU-DT kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

¹¹IZDR 2011, Kajian Empiris Zakat Dalam pengentasan Kemiskinan, Ciputat: IMZ 2011, hal. 4.

¹²BPS, Berita Resmi Statistik, No. 6/01/th. XV, 2 Januari 2012, hal.8.

¹³ BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2010, hal. 11 (Soft Copy)

1. Apakah dana ZIS yang telah didistribusikan LAZDAI & DPU DT memiliki dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan keluarga mustahik, yang meliputi insiden kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan?
2. Berapa lama waktu yang diperlukan LAZDAI dan DPU DT untuk mengentaskan kemiskinan rumah tangga mustahik?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dampak distribusi ZIS oleh LAZDAI dan DPU DT terhadap tingkat kemiskinan keluarga mustahik, yang meliputi insiden kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan.
2. Menganalisa lama waktu yang dibutuhkan oleh LAZDAI dan DPU DT untuk mengentaskan kemiskinan rumah tangga mustahik.

Sejumlah penelitian empirik tentang dampak pendayagunaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah dilakukan. Beik (2010)¹⁴ telah melakukan penelitian mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dengan mengambil studi kasus pada program pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZIS DKI Jakarta dan Dompot Dhuafa Republika. Pada penelitian ini, untuk mengukur dampak zakat terhadap beban kemiskinan digunakan lima indeks kemiskinan, yaitu Headcount Ratio Index (H) untuk mengetahui jumlah kemiskinan, Poverty Gap Ratio (P1) dan Income Gap Ratio (1) untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan, serta Sen Index of Poverty (P2), dan FGT Index (P3) untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Sedangkan untuk mengukur dampak zakat terhadap kesenjangan pendapatan digunakan rasio Gini dan kurva Lorenz. Penelitian ini dilakukan terhadap 1.195 rumah tangga mustahik yang berada di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya distribusi zakat, indeks-indeks kemiskinan dan rasio Gini mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa meski dana zakat masih kecil, namun memiliki dampak nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

¹⁴ Beik, Irfan Syauqi, Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan, dalam *Iqthishodia*, Jurnal Ekonomi Islam Republika, Republika, 29 juli 2010, hal.8.

Tiara Tsani(2010)¹⁵;juga telah melakukan penelitian tentang dampak distribusi zakat terhadap tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, dengan mengambil studi kasus pendayagunaan zakat oleh BAZDA Lampung Selatan. Tiara menggunakan sejumlah alat analisis yang sama dengan alat analisis yang digunakan dalam penelitian Beik (2010) di atas. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 120 responden, yang terdiri dari 80 mustahik dan 40 muzakki. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa setelah distribusi zakat, semua indeks kemiskinan dan rasio Gini mengalami penurunan. Hal ini berarti distribusi zakat oleh BAZDA Lampung Selatan memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Tim IMZ (2011)¹⁶ telah melakukan riset tentang kinerja zakat dalam pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini, ada 8 lembaga zakat yang turut berpartisipasi untuk diteliti, yaitu BAZIS DKI, Dompot Dhuafa, DPU-DT, BMM, YBM BRI, BAMUIS BNI, BAZMA Pertamina, dan PKPU. Sampel yang diambil sebanyak 821 rumah tangga mustahik atau sekitar 17,67 persen dari total populasi yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Alat analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah Headcount ratio, Poverty gap ratio (P1), Income gap ratio (1), Sen index poverty (P2), dan FGT Index (P3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya distribusi zakat, indeks-indeks kemiskinan mustahik mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa distribusi zakat secara umum terbukti mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahik, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan November hingga Desember 2012. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah sepuluh dari tiga belas kecamatan yang ada di Bandar Lampung yang menjadi tempat pelaksanaan program pendayagunaan ZIS oleh LAZDAI dan DPU DT Bandar Lampung. Tiga belas kecamatan tersebut adalah Teluk Betung Barat (TBB), Teluk Betung Selatan (TBS), Panjang, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Utara (TBU), Tanjung Karang Pusat (TKP), Tanjung Karang Barat (TKB), Kemiling, Kedaton, Raja Basa, Tanjung Seneng, Suka Rame dan Suka Bumi.

Pemilihan lokasi ini dikarenakan oleh beberapa alasan pokok, yaitu :

¹⁵ Tiara Tsani, dalam skripsinya : Analisis Dampak Distribusi Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Oleh BAZDA Lampung Selatan), Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB 2010.

¹⁶ IZDR 2011, Kajian Empiris Zakat Dalam pengentasan Kemiskinan, Ciputat: IMZ 2011, hal. 15-51.

1. LAZDAI dan DPU DT merupakan dua diantara beberapa OPZ di Provinsi Lampung yang telah cukup lama beroperasi, dengan penerima manfaat yang cukup banyak. Namun demikian, sampai dengan penelitian ini dilakukan, belum ada satupun yang meneliti tentang kinerja pendayagunaan ZIS oleh dua OPZ ini terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi dua OPZ terkait untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung merupakan wilayah yang kondisi infrastruktur dan transportasinya relatif baik, sehingga memudahkan proses survey dan wawancara lapangan.
3. Karena keterbatasan sumber dana.

3.3. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui survey dan wawancara kepada responden. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat, infak dan sedekah periode 2011 dari Lembaga Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) dan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT) Bandar Lampung.
2. Data sekunder, yaitu mencakup semua data yang diperoleh dari sumber-sumber referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain adalah laporan resmi dua organisasi pengelola zakat tersebut di atas, data kementerian dan lembaga pemerintahan terkait, publikasi ilmiah dan sumber-sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan dan terkait dengan tema penelitian.

Populasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai rumah tangga penerima zakat¹⁷, yang berasal dari 2 OPZ, yaitu LAZDAI dan DPU DT di Bandar Lampung pada tahun 2011. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 300 rumah tangga.¹⁸ Jumlah populasi dari LAZDAI sebanyak 128 rumah tangga dan dari DPU DT sebanyak 58 rumah tangga. Populasi ini pada umumnya masuk kategori ashnaf fakir miskin.

Sedangkan sampel didefinisikan sebagai rumah tangga penerima ZIS yang berhasil disurvei dan diwawancarai oleh peneliti untuk merepresentasikan populasi yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mensurvei semua mustahik yang ada dan tidak memilih secara

¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan rumah tangga dan bukan individu. Tujuannya agar dapat mengetahui implikasi ekonomi zakat terhadap rumah tangga sebagai satu kesatuan individu-individu di dalamnya (IZDR 2011).

¹⁸Jumlah ini adalah berdasarkan catatan database mustahik yang diberikan oleh 2 OPZ terkait kepada peneliti.

acak (*random sampling*). Jumlah sampel yang berhasil disurvei adalah sebanyak 186 rumah tangga mustahik, atau 62 persen dari total populasi.¹⁹ Prosentase sampel pada tiap lembaga tidak merata dikarenakan ukuran sampel yang diperoleh berdasarkan jumlah rumah tangga mustahik yang berhasil dikunjungi dari setiap Organisasi Pengelola Zakat terhadap total populasi.

Komposisi jumlah sampel pada tiap OPZ adalah sebagai berikut :

NO	OPZ	Frekuensi	Prosentase
1	LAZDAI	128	68,82
2	DPU DT	58	31,18
	TOTAL	186	100

Untuk mengetahui seberapa besar ZIS dapat mengurangi beban kemiskinan maka diperlukan alat analisa untuk mengukurnya yaitu indeks-indeks kemiskinan. Penelitian ini menggunakan indeks-indeks kemiskinan yang umum digunakan dalam perbandingan data kemiskinan antar negara di seluruh dunia. Indeks-indeks tersebut adalah *headcount ratio index* yang berfungsi untuk mengukur jumlah kemiskinan mustahik (*poverty incidence*) atau mengukur ketepatan sasaran penerima program; *poverty gap* dan *income gap ratio index* untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan; dan Sen Index serta FGT (*Foster Greer Thorbecke*) index untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan²⁰.

Ketika berbicara mengenai strategi penanggulangan kemiskinan, sangatlah penting mengetahui seberapa lama waktu yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan (*time taken to exit*)²¹. Oleh karenanya, penelitian ini juga mencoba menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan dua OPZ terkait untuk mengentaskan RTM dan dibandingkan bila RTM tersebut tidak memperoleh bantuan zakat.

Keseluruhan alat analisa tersebut diperbandingkan antara sebelum penerimaan zakat dengan sesudah penerimaan zakat oleh *mustahik*. Tujuannya untuk melihat efektifitas penyaluran dana zakat terhadap pengurangan beban kemiskinan.

Sebagai dasar perhitungan, penelitian ini menggunakan pendapatan / pengeluaran rumah tangga mustahik dan garis kemiskinan rumah tangga. Apabila terjadi perbedaan antara

¹⁹Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya yaitu: *pertama*, data alamat tempat tinggal penerima ZIS (yang diberikan oleh OPZ terkait) banyak yang tidak lengkap (kurang jelas) dan nomor handphone mereka sudah tidak aktif. *Kedua*, ada sebagian mereka yang pindah alamat tempat tinggal. Hal ini membuat peneliti kesulitan untuk menemukan alamat mereka.

²⁰ IZDR 2011, Ciptat: IMZ 2011, hal. 19; dan IZDR 2012, Ciptat: IMZ 2012, hal.37.

²¹ IZDR 2012, Ciptat: IMZ 2012, hal.37.

pendapatan dan pengeluaran maka jumlah terbesar yang akan dipilih dan digunakan sebagai data pendapatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih valid dan benar.

3.4.1. Garis Kemiskinan (Poverty Line).

Garis kemiskinan diperlukan untuk mengetahui seseorang (atau rumah tangga) miskin atau tidak miskin²². Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Rumah tangga dengan rata-rata pendapatan atau pengeluaran konsumsi per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai rumah tangga miskin (RTM)²³.

Garis kemiskinan bermanfaat untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase rumah tangga miskin (headcount index), indeks kedalaman kemiskinan (*income gap index dan poverty gap*), dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index - P₂ dan P₃*). Selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar perhitungan *time taken to exit*²⁴.

Adapun standar garis kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar garis kemiskinan (GK) Kota Bandar Lampung yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Lampung untuk tahun 2011, yaitu sebesar Rp. 359.948,00/kapita/bulan²⁵. Kemudian GK per kapita tersebut dikalikan dengan jumlah anggota rumah tangga di masing-masing rumah tangga penerima program zakat sehingga diperoleh garis kemiskinan rumah tangga yang besarnya dapat berbeda di tiap rumah tangga. Penelitian ini mempertimbangkan ukuran rumah tangga di tiap keluarga dikarenakan pada tingkat konsumsi yang sama, utilitas yang dihasilkan rumah tangga akan menurun seiring dengan besarnya ukuran anggota rumah tangga.

3.4.2. Headcount Index (H)

Headcount index adalah pengukuran sederhana untuk mengidentifikasi berapa jumlah dan persentase rumah tangga yang dikategorikan miskin. Indeks ini hanya memenuhi prinsip anonimitas yaitu tidak bergantung pada siapa yang miskin. Besar nilai *headcount index* sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Formula untuk mengukur *headcount ratio index* diperoleh dari *FGT Index* dengan nilai $\alpha = 0$ (Foster, Greer, dan Thorbecke, 1984).

$$P_0 = H = \underline{q}$$

²² Ibid.

²³ Ibid, hal.38

²⁴ Ibid.

²⁵

dimana:

H = *headcount ratio index*

q = jumlah rumah tangga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan

n = jumlah observasi

Apabila nilai *headcount index* menurun, maka pendistribusian zakat berperan positif dalam mengurangi angka kemiskinan. Contoh bila nilai H adalah 0,5 sedangkan total responden sebesar 1000 rumah tangga maka interpretasinya adalah separuh atau 50 persen dari total responden yang disurvei merupakan rumah tangga miskin.

3.4.3. Poverty Gap (P₁)

Alat analisa kemiskinan yang moderat adalah *poverty gap* yang digunakan untuk mengukur jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin. Oleh sebab itu *poverty gap* disebut sebagai ukuran kedalaman kemiskinan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Ukuran ini telah memenuhi prinsip anonimitas dan monotonisitas, tetapi belum memenuhi prinsip transfer atau sensitivitas distribusional.

Untuk menghitung seberapa jauh pendapatan kelompok miskin berada di bawah garis kemiskinan dalam satuan mata uang dapat menggunakan formula:

$$P = \sum_{i=1}^q q_i v_i(z, y)$$

dimana:

g_i = $z - y_i$, selisih pendapatan rumah tangga ke-i dengan garis kemiskinan

$v_i(z, y)$ adalah bobot pendapatan rumah tangga pada distribusi pendapatan y

z = garis kemiskinan

y_i = pendapatan rumah tangga ke-i, $i = 1, 2, \dots, q$

Apabila pasca distribusi zakat, nilai indeks ini mengalami penurunan, berarti zakat memiliki pengaruh positif dalam mempersempit tingkat kesenjangan kemiskinan. Sebaliknya, apabila nilai rasio ini justru meningkat pasca distribusi zakat, maka zakat memiliki implikasi yang negatif.

Nilai *poverty gap* berguna untuk menentukan target sasaran bantuan dan program karena menunjukkan biaya yang dibutuhkan dalam mengentaskan kemiskinan. Ukuran ini memperlihatkan seberapa banyak dana yang harus dimiliki untuk ditransfer kepada RTM sehingga pendapatan mereka naik di atas garis kemiskinan. Keadaan ini dapat terjadi jika tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat (transfer sempurna). Semakin kecil nilai *poverty gap*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan.

3.4.4. *Income Gap Index (I)*

Untuk mengukur persentase rata-rata kesenjangan pendapatan setiap rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan digunakan kesenjangan kemiskinan (P_1) yang dinormalisasi. Indeks kesenjangan pendapatan ini merupakan bagian dari pengukuran FGT Index ketika nilai $\alpha = 1$. Formula sederhana untuk mengukur indeks kesenjangan pendapatan, yaitu:

$$I = \sum_{i \in S(z)} \frac{g_i}{qz}$$

dimana:

- I = indeks *income gap*
- g_i = $z - y_i$, selisih pendapatan rumah tangga ke- i dengan garis kemiskinan
- z = garis kemiskinan
- y_i = pendapatan rumah tangga ke- i , $i = 1, 2, \dots, q$
- q = jumlah rumah tangga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan

Interpretasi *income gap index* sama dengan *poverty gap* hanya saja dalam bentuk persentase dari garis kemiskinan. Contoh nilai *income gap index* adalah 0,3 maka untuk mengentaskan kemiskinan diperlukan rata-rata biaya sebesar 30 persen dari garis kemiskinan untuk tiap rumah tangga. Jika setelah distribusi zakat nilainya berkurang, maka pendistribusian zakat berpengaruh positif dalam mengurangi kedalaman kemiskinan, begitu pula sebaliknya.

3.4.5. *Sen Index (P₂)*

Indeks yang diformulasikan oleh **Amartya Sen** ini adalah indeks yang menggabungkan antara indeks *headcount*, indeks *income gap* dan koefisien Gini untuk orang miskin (atau rumah tangga miskin). Penggunaan indeks ini lebih komprehensif bila dibandingkan indeks-indeks sebelumnya. Komprehensivitas ini menjadikannya sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Formula rasio ini adalah sebagai berikut:

$$P_2 = H [I + (1 - I)G_p]$$

dimana:

H = headcount index

I = income gap

G_p = koefisien Gini untuk kelompok miskin

Jika tidak ada seorangpun yang hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, maka nilai indeks Sen ini akan sama dengan nol. Dalam konteks pendayagunaan zakat, jika nilai indeks ini mengalami penurunan, maka artinya zakat memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat keparahan kemiskinan. Demikian pula sebaliknya.

3.4.6. FGT (Foster Greer Thorbecke) Index

Indeks FGT dan Indeks Sen digunakan untuk mengukur keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan / pengeluaran di antara rumah tangga miskin. Formulasnya adalah sebagai berikut:

$$P_{\alpha}(y, z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{Q_i}{Z} \right)^{\alpha}$$

dimana:

g_i = selisih pendapatan rumah tangga ke-i dengan garis kemiskinan

z = garis kemiskinan

q = jumlah rumah tangga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan

α = nilai parameter yang digunakan; untuk indeks FGT α = 2

Indeks keparahan kemiskinan (Indeks Send and Indeks FGT) dan indeks kedalaman kemiskinan (P1 dan I) melengkapi informasi dari insiden kemiskinan. Contoh dalam sebuah kasus terdapat kelompok tertentu yang memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi kedalaman kemiskinan rendah, sedangkan pada kelompok lain insiden kemiskinan rendah tetapi kedalaman kemiskinan yang tinggi.

Interpretasi indeks ini sangat bergantung pada nilainya. Jika program pendistribusian dan pendayagunaan zakat ini mampu menurunkan nilai indeks FGT, maka zakat dapat dianggap memiliki implikasi yang positif terhadap penurunan tingkat keparahan kemiskinan. Demikian pula sebaliknya.

3.4.7. Time Taken to Exit

Dengan mengasumsikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinikmati masyarakat miskin tumbuh positif sebesar g per Tahun maka:

$$t_g^j \approx \frac{\ln(z) - \ln(x_j)}{g} = \frac{w}{g}$$

Dimana

$$W = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q [\ln(z) - \ln(y_i)]$$

Keterangan:

- t_g^j = lama waktu untuk mengentaskan kemiskinan
- w = Watt Index
- z = garis kemiskinan
- N = total populasi
- y_i = pendapatan rumah tangga miskin ke- i
- g = persentase pertumbuhan ekonomi yang dinikmati orang miskin (tingkat pertumbuhan pendapatan / pengeluaran orang miskin)

Pertumbuhan ekonomi turut mengambil peran dalam mempercepat pengentasan kemiskinan asalkan masyarakat miskin memperoleh bagian dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Semakin besar prosentase bagian bagi rakyat miskin maka akan semakin berdampak positif terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Bila setelah pendistribusian zakat waktu yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan berkurang maka pendistribusian zakat tersebut juga memiliki andil dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.